

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
MANDALLE KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**



Oleh:

MUH. FACHRI ISMIRAJ

105641105218

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA MANDALLE KECAMATAN BAJENG BARAT
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH. FACHRI ISMIRAJ

Nomor Induk Mahasiswa: 105641105218

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

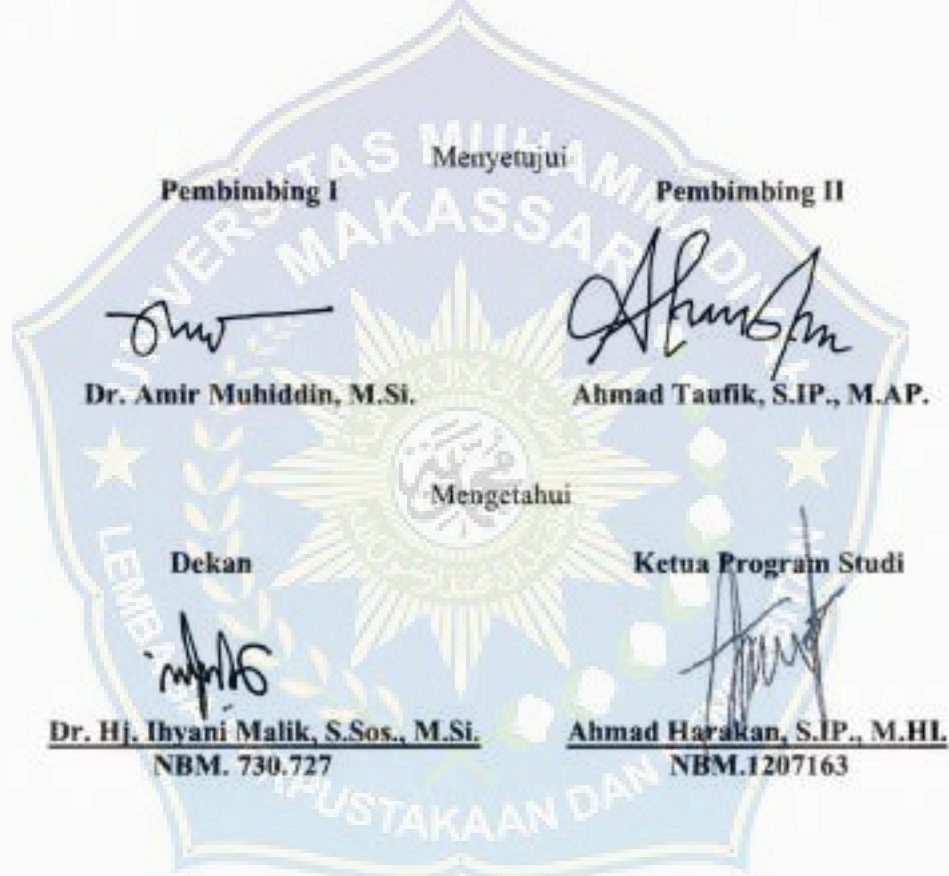
Judul Skripsi : Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan
Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng
Barat Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh. Fachri Ismiraj

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0283/FSP/ A.4-II/VII/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024.



Mengetahui


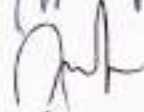

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727

Dr. Andi Lohur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji

1. Ahmad Harakan S.IP., M.HI ()
2. Irwan Alim S.IP., M.A ()
3. Muhammad Amril Pratama Putra S.IP., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fachri Ismiraj

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang Menyatakan,


Muh. Fachri Ismiraj

Abstrak

Muh. Fachri Ismiraj, 2024. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. (Pembimbing I Amir Muhiddin, Pembimbing II Ahmad Taufik).

Salah satu aktivitas politik penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia adalah pemilihan kepala desa. Selain menunjukkan partisipasi dalam pemilihan dengan memberikan suara, masyarakat juga menunjukkan partisipasi dalam bentuk yang lebih luas, seperti berbicara tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang partisipasi pemilih di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan penelitian ini ada tiga dari Masyarakat Desa Mandalle yang sudah memiliki hak dalam memilih.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setiap pemilih memiliki tiga cara untuk mendukung pemilihan kepala desa yaitu adalah partisipasi pemilih dalam diskusi politik, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. Berbicara tentang politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu contoh partisipasi politik dalam kegiatan kampanye adalah kampanye pemilihan kepala desa. Kampanye ini membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan demografi, karakteristik lokal, dan metode komunikasi yang efektif dengan penduduk desa. Masyarakat Mandalle memilih calon kepala desa berdasarkan kriteria tertentu, meskipun masyarakat memberikan suara berdasarkan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pemilih memilih kandidat yang memiliki tujuan dan tujuan yang jelas untuk masa depan masyarakat Mandalle. Kandidat yang terkenal dan bermoral cenderung dipilih oleh pemilih. Pemilih juga memilih kandidat berdasarkan tujuan dan rencana kerja mereka untuk masa jabatan kepala desa.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye, Pemberian Suara, Panitia Pemilihan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untaian rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada sang pemilik semesta, pemilik hari pembalasan, yang maha kuasa dan yang maha membolak-bolakkan hati manusia. *Allah Subhanawataala* yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira bagi segenap umat manusia. Maka, sudah sepantasnya manusia senantiasa memiliki rasa syukur atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Segala hal yang terjadi pada kehidupan adalah terjadi sesuai kodrat kehendaknya, termasuk pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, adalah bentuk nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanawataala kepada penulis. Meski tidak lepas dari berbagai dinamika yang mewarnai tapi, itulah estetika sebuah kehidupan. Tanpa tantangan apalah arti kehidupan ini. Kita hanya perlu menjalani dan menikmati setiap takdir.

Selawat dan salam sepatutnya senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Subhanawataala, pemuda padang pasir, manusia yang dalam sakaratul mautnya masih mengingat umatnya. Sang pembela umat islam, yakni baginda Nabi Besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Sang penggerak peradaban umat manusia, nabi yang membawa pelita penerang bagi kehidupan manusia. Salam serta selawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, tabiin serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan kebenaran dinul islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian studi ilmu pemerintahan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap skripsi ini

dapat memiliki manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, ungkapan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki andil dalam penyelesaian ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rasa sayang dan cinta yang besar, terimakasih yang tidak terhingga untuk dua manusia hebat yang membimbing dan mendidik dengan hebatnya yaitu orang tua saya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Beserta Jajarannya.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Amir Muhiddin M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP. selaku Pembimbing II yang telah membantu untuk menyemenganti penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau pun asisten, serta seluruh Staf Pegawai atau karyawan Tata Usaha di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Terima kasih juga kepada seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini.
7. Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala dinamika, tantangan antara akademik dan amanah yang diemban di bahu, skripsi bisa diselesaikan oleh penulis. Semoga menjadi manfaat bagi setiap manusia dan mendapat berkah di sisi *Allah Subhanawataala*.

Makassar, 24 Januari 2024

Muh. Fachri Ismiraj



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Partisipasi Pemilih.....	14
C. Kerangka Pikir.....	22
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Data dan Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian	27

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	30
G. Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	34
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahlu	10
Tabel 2.2 Bentuk Partisipasi Politik.....	22
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28



DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses kemajuan demokrasi di Indonesia telah mengalami masa sulit, yang diwarnai oleh tantangan untuk menyatukan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat serta upaya untuk menghapus sistem kediktatoran yang ada. Untuk menggabungkan orang-orang dari berbagai perspektif adalah tugas yang sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat UUD 1945 dan perjuangan para pendiri bangsa akhirnya memungkinkan Indonesia untuk mengaktualisasikan demokrasinya dengan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1955. Salah satu jenis sistem demokrasi yang ada di Indonesia adalah pemilu, yang didirikan dengan munculnya partai politik dan kemudian berkompetisi dalam "Pesta Demokrasi". "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" adalah definisi demokrasi Abraham Lincoln. Dia percaya bahwa ini adalah yang terbaik dan paling diinginkan oleh masyarakat di dunia ini (Fitriyah et al., 2021).

Demokrasi didefinisikan sebagai suatu pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi, yang merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat penting yang dilakukan oleh warga negara. Partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala desa, atau Pilkades, dianggap sebagai tempat demokrasi desa yang paling nyata; pemilihan dilakukan secara langsung dengan prinsip satu orang satu suara dan kompetisi yang bebas (Haluana'a et al., 2020). Pemilihan

umum berfungsi karena memberikan masyarakat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan keputusan mereka sendiri. Pemilihan umum menunjukkan seberapa baik tata kehidupan bernegara diatur oleh kedaulatan rakyat dan demokrasi (Yani, 2022). Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana orang memilih pemimpin negara. Ada keyakinan umum bahwa pemilihan umum adalah cara yang paling aman untuk mengubah kekuasaan karena didasarkan pada kehendak suara. Akibatnya, sering disebut sebagai pilar utama demokrasi. Pemilihan umum sangat penting karena berfungsi sebagai pengakuan dan dukungan atas legitimasi rezim dan kekuasaan yang ada.

Selama pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan pemilih akan menilai kontestan yang menawarkan visi dan misi untuk menentukan jalan negara mereka. Oleh karena itu, pemilu sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang disepakati bersama: pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pemilu harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Harahap et al, 2021).

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang krusial dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, desa memainkan peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari warga desa dalam pemilihan kepala desa menjadi sangat penting, karena dapat menentukan pemimpin yang berkualitas dan memiliki

komitmen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang penting dalam menentukan kepemimpinan lokal di tingkat desa. Pemilihan kepala desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih calon yang dianggap mampu mewakili dan mensejahterakan masyarakat desa. Tidak hanya partisipasi yang ditunjukkan dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, masyarakat juga menunjukkan partisipasi dalam bentuk yang lebih luas, seperti berpartisipasi dalam diskusi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan proses pengambilan keputusan.

Desa-desa di Indonesia sekarang memiliki tradisi demokrasi di mana keterbukaan, permusyawaratan, dan partisipasi menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga melakukan pemilihan kepala desa secara langsung. Kepala desa adalah posisi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat sipil, tetapi lurah dipilih secara tidak langsung oleh masyarakat (Satria, 2020).

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dari demokrasi yang sehat. Namun, ada berbagai kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih diantaranya kurangnya pendidikan pemilih dan apatisme serta ketidakpercayaan pada system politik. Salah satu perdebatan yang juga menyebabkan pemilih pemula tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan adalah karena sistem multipartai memungkinkan terlalu banyak partai bertanding dalam pemilihan, yang menimbulkan dilema bagi pemilih pemula (Mursyid & Larissa, 2021).

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 58 Undang-Undang ini mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan musyawarah. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh warga desa yang berhak memilih.

Hak dan kewajiban pemilih dalam pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Warga desa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa. Mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan hak pilihnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis di tingkat desa untuk memilih pemimpin lokal yang akan memimpin dan mengelola urusan desa. Biasanya, pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh warga desa atau melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka. Proses pemilihan kepala desa melibatkan beberapa tahap, seperti pendaftaran calon, kampanye, debat, dan pemungutan suara. Calon kepala desa akan mempresentasikan visi, program, dan kompetensinya kepada warga desa untuk mendapatkan dukungan. Penting untuk mendorong partisipasi aktif warga desa dalam pemilihan ini, karena kepala desa akan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa merupakan cermin dari tingkat keterlibatan dan kesadaran politik warga desa terhadap

pemerintahan dan perkembangan wilayahnya. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator vital dalam demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai pendorong keabsahan dan legitimasi pemimpin terpilih. Pemilihan kepala desa di Indonesia diatur oleh undang-undang dan menjadi bagian integral dari sistem politik desa. Namun, partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa telah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Beberapa wilayah mencatat tingkat partisipasi yang tinggi, sementara wilayah lain menghadapi tantangan tingkat partisipasi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, khususnya hubungan interpersonal dan kesadaran politik.

Pemilihan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah desa harus menganggap Pilkades sebagai bentuk, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, yang mengubah aturan Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. demokrasi di tingkat desa. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan efisien.

Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa merupakan konsep yang terus berkembang dalam konteks demokrasi lokal. Partisipasi pemilih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti identifikasi politik, keterlibatan masyarakat, dan saluran komunikasi politik (Parvin & Alam, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan interaksi antara individu di lingkungan desa (Chotimah, 2019). Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih memahami pengaruh hubungan interpersonal dan kesadaran politik terhadap partisipasi pemilih. Tidak hanya partisipasi yang ditunjukkan dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, masyarakat juga menunjukkan partisipasi dalam bentuk yang lebih luas, seperti berpartisipasi dalam diskusi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan proses pengambilan keputusan (Husna & Fahrimal, 2021).

Partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa adalah elemen penting dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dapat menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Namun, partisipasi pemilih yang rendah dapat menyebabkan hasil pemilihan yang kurang mewakili suara mayoritas penduduk desa dan berdampak negatif pada kualitas pemerintahan desa.

Selain itu, kesadaran politik individu juga memiliki peran penting dalam partisipasi pemilih. Kesadaran politik menggambarkan pemahaman individu tentang proses politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta

kepedulian terhadap masalah-masalah politik dan pemerintahan. Tingkat kesadaran politik seseorang dapat mempengaruhi keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik seseorang, semakin mungkin mereka akan merasa pentingnya hak suara mereka dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa.

Kesadaran politik merupakan dimensi penting dalam memahami partisipasi pemilih. Kesadaran politik mencakup pengetahuan politik, minat politik, dan sikap politik individu terhadap proses politik di tingkat desa. Kesadaran politik yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan keaktifan dalam proses pemilihan kepala desa.

Partisipasi politik masyarakat ini didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang juga dilaksanakan di provinsi Sulawesi selatan yaitu penelitian yang dilakukan di adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 dengan secara langsung memberikan suaranya ditempat pemungutan suara (TPS) dengan tingkat kehadiran yang baik. Selain itu ada faktor yang membuat masyarakat mempunyai sikap partisipasi yang aktif yaitu rasa simpatik masyarakat terhadap salah satu calon atau salah satu pasangan walikota yang mereka harapkan dapat memimpin (Chaerul, 2019).

Namun, meskipun telah banyak penelitian tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, hanya sedikit penelitian yang secara khusus fokus pada partisipasi pemilih dalam konteks pemilihan kepala desa mandalle kec.

Bajeng barat Kabupaten Gowa, terutama dengan mempertimbangkan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan, kampanye dan diskusi politik dalam proses ini.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa (1) Kepala Desa dipegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan (2) Kepala Desa yang disebutkan pada ayat (1) dapat menjabat selama paling banyak 3 (tiga) tahun berturut-turut. Undang-undang ini menetapkan batas waktu maksimal untuk jabatan kepala desa. Seseorang yang dilantik sebagai kepala desa dianggap "terhitung sejak tanggal pelantikan" jika dia mengundurkan diri sebelum habis masa jabatan. Kepala desa yang telah menjabat selama satu periode diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali untuk paling lama dua (dua) periode. Untuk saat ini, kepala desa

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelidiki tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa mandalle Kec. Bajeng barat kab. Gowa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan politik, pemangku kepentingan masyarakat, dan peneliti lainnya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkades.

Dengan menjembatani kesenjangan penelitian dan menyediakan bukti empiris tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa Mandalle kec. Bajeng barat kab. Gowa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang partisipasi politik

tingkat lokal dan bagaimana meningkatkannya untuk menghasilkan tata pemerintahan yang lebih efektif dan responsif di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah Bagaimana gambaran partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa Mandalle kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan gambaran partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa mandalle kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa mandalle kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini terbagai menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemahaman kita tentang partisipasi politik tingkat lokal dan bagaimana meningkatkannya untuk menghasilkan tata pemerintahan yang lebih efektif dan responsif di tingkat desa dan juga memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih

di tingkat desa dan dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses pemilihan kepala desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyajikan beberapa manfaat terhadap banyak rekan yang terlibat seperti penyelenggara, sebagai bahan alternatif dapat memberikan koreksi tentang meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik lokal



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, penelitian terdahulu terkait penelitian ini serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Umami et al., 2021) Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa meningkat secara bersamaan dari 2013 hingga 2019, meningkat setiap tahun di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan presentase pemilih di setiap desa, seperti Desa A dengan 32 persen, Desa B dengan 2 persen, Desa C dengan 16 persen, dan	Persamaan penelitian Umami dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.	Perbedaannya adalah penelitian Umami objek kajiannya adalah pilkades serentak than 2019. Sedangkan penelitian ini mengkaji terkait partisipasi pemilih di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Desa D dengan 16 persen.		
2	(Haluana, 2019) Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan)	Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Orahili sangat terlibat dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat mulai meningkat dan bahwa masyarakat mencari pemimpin yang berpengalaman dalam pemerintahan yang ingin mengayomi dan melayani semua orang.	Persamaan penelitian Haluana dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.	Perbedaanya penelitian Haluana dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat kesadaran masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki 3 indikator yang digunakan dalam mengkaji tentang partisipasi pemilih di Desa Mandalle.
3	(Windy, 2019) Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)	Partisipasi politik masyarakat masih rendah pada saat pemilihan kepala desa Liba 2016. Secara umum, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat	Persamaan penelitian Windy dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.	Perbedaanya penelitian Windy dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat yang mengakibatkan kurangnya

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>terhadap kinerja kepala desa, yang disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Akibatnya, masyarakat percaya bahwa pemerintah desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan mereka.</p>		<p>kepercayaan terhadap kepala desa. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki indicator sendiri yang digunakan dalam mengkaji tentang partisipasi pemilih di Desa Mandalle.</p>
4	<p>(Damayanti & Fauzi, 2022) Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik. Pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan</p>	<p>Persamaan penelitian Windy dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.</p>	<p>Perbedaanya penelitian Damayanti & Fauzi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat partisipasi pemilih pemula yang masyarakatnya merupakan perilaku politik opportunis. Sedangkan penelitian ini bukan hanya berfokus pada pemilih pemula tetapi</p>

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		bentuk perilaku pemilih yang konsisten & pragmatis		semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.
5	(Garis & Trisnia, 2021) Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam pilkades serentak Desa Muktisari tahun 2020 masih sangat rendah dan belum optimal. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari tujuh kandidat untuk posisi kepala desa Muktisari, hanya lima yang terpilih, dan semua kandidat tersebut adalah laki-laki. Masyarakat Desa Muktisari tidak menyadari peranan gender dan menganggap perempuan hanyalah perlengkapan rumah tangga seperti sumur, dapur, dan kasur, tanpa terlibat secara langsung dalam	Persamaan penelitian Garis & Trisnia dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.	Perbedaannya penelitian Garis & Trisnia dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat partisipasi pemilih pemula yang masih belum optimal. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		politik.		

B. Konsep Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan atau keterpilihan warga dalam proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Ini mencakup kegiatan seperti mendaftar sebagai pemilih, memberikan suara, dan terlibat dalam proses politik seperti kampanye atau mendiskusikan isu-isu politik. Tingkat partisipasi pemilih dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti sistem politik, kebijakan pemilihan, budaya politik, dan tingkat kesadaran politik dalam masyarakat. Tingkat partisipasi yang tinggi sering dianggap sebagai indikator kesehatan demokrasi suatu negara.

Partisipasi pemilih adalah bagaimana seorang warga negara menggunakan hak mereka untuk memilih atau memberikan suara mereka pada penyelenggaraan pemilihan, seperti legislatif, presiden, dan kepala daerah. Meskipun pada dasarnya membuat seseorang mau berpartisipasi bukan hal yang mudah, masih ada orang yang enggan berpartisipasi sementara partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah memiliki dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat menetapkan kebijakan yang positif, kemudian didukung dengan pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Namun, apabila masyarakat menetapkan kebijakan yang buruk, kemudian didukung dengan pelaksanaan dan pengawasan yang baik, maka hasilnya

akan menjadi baik (Yusran & Sapar, 2022).

Bagi negara demokrasi, permasalahan partisipasi politik menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengingatkan bahwa sistem politik demokratis mengandaikan rakyat atau warga negara adalah pemilik mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. Setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah harus mendapatkan legalitas dari sebagian besar atau seluruh rakyat atau warga negara. Partisipasi politik dianggap sebagai sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mendapatkan legalitas dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Dengan demikian semakin besarnya ruang partisipasi politik yang disediakan oleh sistem politik maka sistem politik tersebut akan semakin demokratis.

Terkait dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik merupakan bagian dari partisipasi secara nyata, dalam definisi partisipasi politik secara aktif terdapat beberapa istilah yang masih umum menjadi acuan banyak orang. Dimana kondisi tersebut didefinisikan sebagai bagian dari kegiatan partisipasi politik dalam bentuk aktivitas, semisal dari kegiatan politik yang syarat akan agenda kepentingan mempengaruhi masa, kampanye, dan hingga dengan sampai pada kegiatan yang utama adalah terkait penyaluran suara politik ketika pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik termasuk mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan kebijakan,

mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan calon pemimpin alternatif, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum (Azzuhri, 2022).

Persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS) atau voting lebih sering dikaitkan dengan partisipasi politik dalam pemilu daripada berbagai aktivitas lainnya. Seringkali, tingkat partisipasi politik ini dikaitkan dengan legitimasi hasil pemilu, atau jumlah dukungan suara yang diterima oleh pemenang pemilu; rumusnya adalah bahwa semakin tinggi partisipasi politik, semakin legitimasi hasil pemilunya (Landmore, 2020). Sebagai negara demokrasi rakyat berdaulat, dia percaya bahwa dia memiliki hak untuk memengaruhi keputusan politik yang berhubungan dengan kepentingannya sendiri. Partisipasi aktif berfokus pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif hanya berfokus pada proses output (Fitriyah et al., 2021).

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu dalam proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti memilih dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, berpartisipasi dalam demonstrasi atau protes, menyuarakan pendapat dalam forum politik, serta mengikuti berita dan isu-isu politik.

Partisipasi politik adalah salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, mengajukan tuntutan, dan mengekspresikan

preferensi mereka. Tingkat partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, akses ke media, keyakinan politik, dan kepercayaan terhadap proses politik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi sering dianggap sebagai tanda kesehatan demokrasi dalam suatu negara.

Partisipasi politik berdasarkan dari dua hal penting pertama partisipasi dan yang kedua adalah politik. Pertama, partisipasi jika kita artikan dengan bahasa yang lebih luas adalah dimana kegiatan yang dilakukan oleh orang masyarakat yang orientasinya adalah ujukan. Partisipasi menurut Keith Davis (Stepanus, 2013) adalah *“as mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”* (keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri).

Sedangkan menurut Fithriadi (Hadi, 2013) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Kedua adalah politik, politik merupakan sesuatu yang sangat identik dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi. Menurut Plato politik bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep politik ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan

masyarakat yang ideal atau lebih baik. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*Political Animal*), maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara alamiah dalam diri setiap manusia (Muhadum & Leguh, 2015).

Partisipasi politik dilihat dari definisi diatas dapat di kita bayangkan merupakan hasil yang dilakukan masyarakat bahkan dalam bentuk kelompok kecil dan besar, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, kekuasaan, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Partisipasi politik masyarakat ini bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang dimana dalam menjadikan kesepakatan dalam bentuk politik pemerintah dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi dan politik di masyarakat luas, serta menentukan isi kputusan yang di buat oleh pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dalam politik merupakan kondisi yang sukarela dan murni dilakukan masyarakat, sehingga mereka memilih pemilihan umum sebagai ajang mencari pemimpin yang ideal menurut mereka agara sesuai dengan visi dan misi.

Ramlan (Bawono, 2008) berpendapat bahwa adanya sikap aktif dari masyarakat terkait proses politik dapat berdampak dalam menentukan hasil outout sebuah kebijakan yang dimana nantinya akan berdampak secara langsung pada kehidupan mereka. Sehingga kita dapat memberikan pemahaman, bahwasanya partisipasi politik ialah bagian yang tidak

terpisahkan dalam satu kesatuan kehidupan masyarakat secara luas.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Sedangkan terkait bentuk partisipasi dapat diamati dari perilaku yang saat ini terjadi di masyarakat. Partisipasi tersebut secara umum berbentuk yang dapat diamati secara seksama, sebagai contoh nilai mata uang, keahlian yang dimiliki, dan benda. Adapun partisipasi yang tidak dapat dilihat secara langsung adalah dimana hasil dari infiltrasi pemikiran masyarakat yang dimana mewakili dari hasil kebijakan publik. Model partisipasi politik terbagi kedalam beberapa bentuk antara lain adalah: Kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum. *Lobbying*, Kegiatan organisasi politik. Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan dan memengaruhi proses politik dengan kekerasan (Elly & Usman, 2013).

Dalam pendapat tokoh bernama Tur Wahyudin beliau memisahkan partisipasi kedalam berbagai jenis yaitu:

a. Masyarakat dalam kondisi Primitif / kurang pemahaman

Kondisi tersebut menjadikan adanya partisipasi sangat baik, dengan jumlah yang signifikan, sehingga kita merasa susah membedakan.

b. Masyarakat dalam proses berkembang

Memiliki pengaruh dan ketaatan yang sangat besar, sehingga golput rendah Masyarakat dalam kondisi ini memiliki karakteristik campuran dari pemahaman tradisional ke pasca modern, sehingga pemahaman mereka menjadikan lemah

c. Masyarakat yang memiliki sifat totaliter,

Karakteristik satu ini adalah unik, dan memegang peran besar dalam pengontrolan proses politik

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, Amstein pula menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat.

Jika mengacu dalam pendapat diatas, terkait dengan partisipasi politik menurut Amstein yang dimana menggambarkan anatomi secara detail terkait tahapan atau skema jalur partisipasi ditengah kondisi lapangan masyarakat. Adapun beberapa tahapan yang di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan memanipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan, akan tetapi masuk dalam tahap 2 terdapat proses perbaikan yang dimana konsep sebenarnya.
- b. Tangga ketiga dimana memberikan pemahaman terkait proses partisipasi politik, selain itu keberlanjutan tangga selanjutnya pada tangga ke empat dimana lebih ditekankan pada proses konsultasi, hingga ke tangga lima ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang ada.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Berbagai macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Berdasarkan buku Perbandingan Sistem Politik, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: (Gabriel, 2008).

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi

politik dapat dilihat ada tabel berikut.

Tabel 2.2 Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) 7. Perang grilya dan revolusi

Sumber: Buku Perbandingan Sistem Politik Gabriel Almond

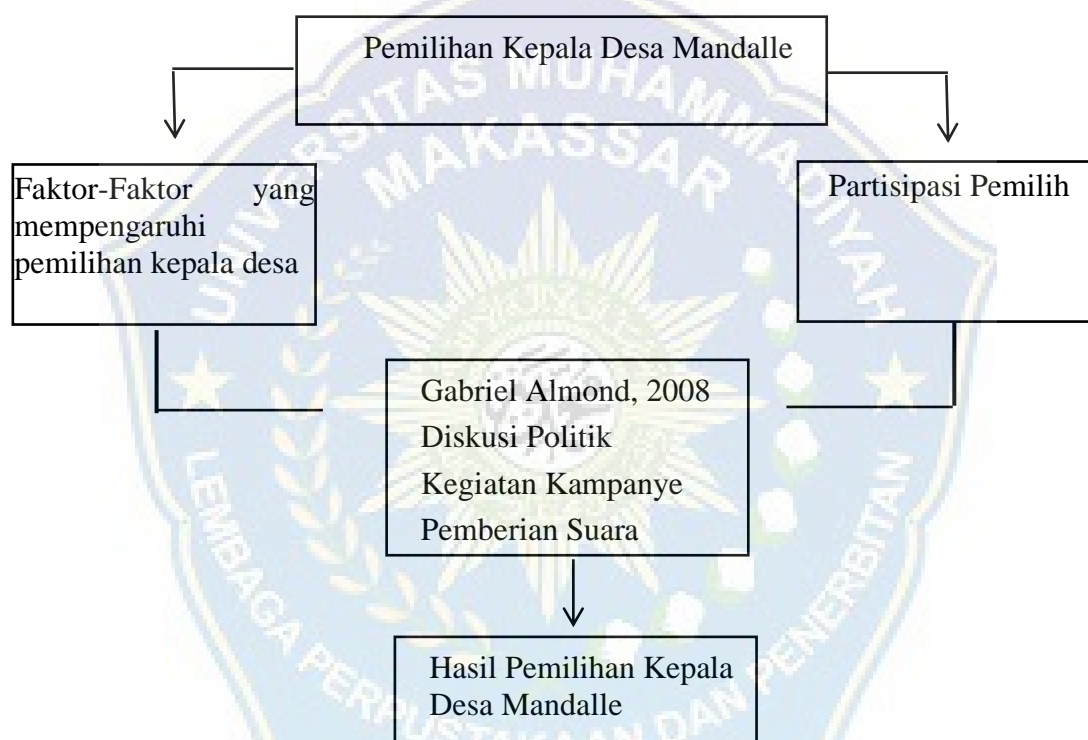
Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

C. Kerangka Pikir

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana mereka berada pada negara demokrasi, demikian pula dengan masyarakat Desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, sebagai warga negara yang mendukung proses demokrasi dan pembangunan negara. Masyarakat berhak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing masing.

Menurut Herbert McClosky (Budiarjo, 2015) bahwa partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus

merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.



Gambar 2.1 kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang Partisipasi Politik masyarakat Desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Maka fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: partisipasi pemilih Desa Mandalle, partisipasi pemilih Desa Mandalle pada diskusi politik, masa

kampanye, partisipasi pemilih Desa Mandalle pada pemberian suara.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik. Dalam hal ini partisipasi politik masyarakat Desa Mandalle Dalam Pemilihan Kepala Desa
2. Partisipasi politik konvensional ada beberapa bentuk diantaranya:
 - a. Diskusi Politik, adalah tukar pikiran dan pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi, dilakukan baik secara formal maupun informal, dalam hal ini masyarakat Desa Mandalle sering berbicara mengenai peristiwa peristiwa politik yang terjadi.
 - b. Kegiatan kampanye, adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan, Dimana hal nya salah satu calon pasangan calon mencari dukungan ke masyarakat Desa Mandalle
 - c. Pemberian suara, adalah pemilih yang terdaftar DPT datang ke TPS memberikan suara untuk memilih calon pemimpin, dimana masyarakat Desa Mandalle datang memberikan suara di TPS untuk mendukung pasangan calon yang diinginkan.
3. Faktor pendukung masyarakat adat kajang dalam proses pemberian suara adalah faktor faktor yang membantu masyarakat Desa Mandalle pada saat pemberian suara. Adapun faktor faktor pendukung masyarakat Desa Mandalle pada pemberian suara adalah : Sosialisasi dan Kesadaran Politik.

4. Faktor penghambat masyarakat adat kajang dalam proses pemungutan suara adalah faktor yang menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mandalle Pada Pemberian Suara. Adapun faktor penghambat masyarakat Desa Mandalle pada saat pemberian suara adalah faktor ekonomi, dimana sebagian masyarakat Desa Mandalle merantau keluar daerah dan enggan pulang kampung pada saat pemungutan suara
5. Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud adalah kesadaran politik masyarakat Desa Mandalle yang sudah memberikan dampak positif dari perkembangan demokrasi di Desa dan dapat dipastikan keaktifannya dalam mengisi momentum demokrasi di daerah atau provinsi khususnya di Sulawesi Selatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan, Desa tersebut dipilih karena karakteristik masyarakat yang bervariasi dan cenderung masih kurang pengetahuan terkait pemilihan politik. Adapun waktu penelitian dimulai pada November-Desember 2023.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek yang diwawancarai dan dukungan data-data dari lokasi penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa Mandalle kecamatan Bajeng Barat Kab. Gowa.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data menyatakan darimana data penelitian itu diperoleh. Dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata kata, dan tindakan (wawancara atau pengamatan), catatan tertulis melalui *video/ audio tapes*, foto dan statistik (Meleong, 2012). Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini. Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau data yang sudah ada seperti penelitian tentang partisipasi politik masyarakat, teori partisipasi dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data dari penelitian sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*. yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dimana menganggap bahwa informan yang dipilih mengetahui betul informasi dan memiliki data data yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Dg Tawang	Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mandalle
2	Suardi, SP	Masyarakat Desa Mandalle
3	Nur Hikmawati	Masyarakat Desa Mandalle

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menginventarisasi subjek fisik yang ada di lapangan dan menunjang penelitian karena dipakai dalam berbagai keperluan. Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar.

Selain itu, dokumentasi juga menggunakan *internet searching*, atau pencarian online. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi digunakan selain metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan memperoleh foto dan gambaran tentang masyarakat desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa

2. Metode observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan

seluruhalat indra. Menurut Guba dan Lincoln, pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.

Kedua, pengamatan kemungkinan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung dari data. Ketiga, sering terjadi ada keraguan pada peneliti pada data yang dijaringnya terdapat kekeliruan (Moleong, 2012). Pedoman observasi lebih dikhususkan untuk mengamati partisipasi masyarakat desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa provinsi sulawesi selatan.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan sumber data untuk menggali data dalam perspektif kata untuk mengungkapkan inti dari masalah yang diteliti. Metode wawancara terstruktur digunakan oleh peneliti, yang melibatkan pertanyaan yang telah disiapkan khusus untuk masalah yang akan diteliti. Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara kepada orang-orang tahu tentang situasi sosial. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana

partisipasi masyarakat desa Mandalle, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Bila jawaban yang diwawancarai belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai data yang diinginkan dapat diperoleh. Hasil rekaman wawancara dilakukan dengan proses secara berulang-ulang untuk memahami makna secara mendalam. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Proses Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman terkait hasil pengumpulan data dengan memilih hal hal yang pokok dan dianggap penting yang sesuai dengan dokumentasi maupun catatan yang telah dicatat secara garis besarnya.

2. Proses Display Data

Setelah proses reduksi data selesai maka dibuatlah sebuah interpretasi berdasarkan data yang telah disaring dengan menggabungkan semua hasil peristiwa yang terjadi dilapangan. Dan diinterpretasi agar data lebih terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan temuan yang berupa deskripsi dari hasil interpretasi pada suatu objek atau pola yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

G. Teknik Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Sehingga dalam penelitian digunakan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu. Adapun Penjelasannya sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu pagi pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang tentunya terdiri dari berbagai kecamatan. Salah satunya Kecamatan Bajeng Barat yang merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan kecamatan pallangga di sebelah utara, kecamatan bontopanno di sebelah selatan, dan kecamatan barombong di sebelah barat. Kecamatan Bajeng Barat juga berada di sebelah timur.

Jumlah penduduk Bajeng Barat pada tahun 2018 terakhir pada data BPS berjumlah 25 388,00 dengan mata pencaharian sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Kecamatan Bajeng Barat tersebar atas 7 Desa yaitu Desa Gentungang, Tanabangka, Borimatangkasa, Mandalle, Manjalling, Kalemandalle dan Desa Bontomanai. Desa Mandalle merupakan lokasi dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui partisipasi pemilih pada pemilihan kepala Desa di Desa Mandalle.

Seperti desa-desa lainnya di Indonesia, Desa Mandalle memiliki struktur pemerintahan desa yang mengatur urusan lokal dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Kecamatan Bajeng Barat dan Kabupaten Gowa sendiri merupakan bagian dari administrasi pemerintahan yang lebih besar di wilayah Sulawesi Selatan.

Pada awalnya, Desa Mandalle terdiri dari gabungan beberapa kampung: Bontomanai, Minasabaji (juga dikenal sebagai Tamattia), Kampung Tunirannuang (juga dikenal sebagai Maccinikondo) (kampung Mattoanging sekarang Dusun Mattoanging), Kampung Binabbasa, dan Kampung Passimbungang. Desa Mandalle memiliki luas 222,22 km² dan merupakan salah satu dari 7 Desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Terletak 3 km ke arah timur dari Kota Kecamatan Bajeng Barat. Secara geografis Desa Mandalle mempunyai iklim tropis yang umumnya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat.

Secara Topografi, Desa Mandalle adalah daerah dataran rendah dengan Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lainlain dengan luas \pm 222,22 Km². Secara Administratif wilayah Desa Mandalle terdiri dari 21 (Dua Puluh) RT, dan 09 (Sembilan) RW, meliputi (4 dusun) Dengan kondisi topografi demikian, Desa Mandalle memiliki variasi ketinggian antara 0,0 m sampai dengan 2,40 m dari permukaan laut.

Desa Mandalle memiliki batas wilayah dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalemandalle sebelah timur berbatasan dengan Desa Bontomanai sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barombong dan dari sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong. Desa Mandalle adalah desa dengan 2.973 penduduk dan berjarak 24 km dari Makassar. Wilayahnya

222.222 km², terutama persawahan dan perkebunan. Dengan jumlah penduduk 2.973 jiwa dan 812 kepala keluarga pada tahun 2017, desa Mandalle jelas merupakan desa agraris karena 85% penduduknya bekerja sebagai petani sawah. Sisanya bekerja sebagai PNS dan pedagang. Keadaan ekonomi desa Mandalle belum cukup untuk menempatkannya sebagai masyarakat menengah ke atas atau mampu (Mariana et al., 2021).

B. Hasil Penelitian

Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pemilihan adalah partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi legitimasi pemilihan secara otomatis. Partisipasi pemilih merujuk pada tingkat keterlibatan atau kehadiran warga negara dalam proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Tingkat partisipasi pemilih dapat diukur berdasarkan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memilih dan seberapa banyak dari mereka yang benar-benar memberikan suara mereka dalam pemilihan.

Partisipasi pemilih penting dalam sistem demokrasi karena mencerminkan tingkat keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin representatif suara rakyat dalam pemilihan. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah dapat menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi pemerintahan dan kecenderungan merosotnya nilai-nilai demokratis. Pemilihan pemimpin melalui pemilu menjadi ciri khas negara demokrasi. Salah satunya pada pemilihan Kepala Desa. Bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih dalam

pemilihan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa terwujud dalam tiga hal yaitu diskusi politik, kegiatan kampanye dan pemberian suara pada pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, berikut hasil wawancara dengan berbagai informan terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa Mandalle serta segala faktor yang mempengaruhinya.

1. Diskusi Politik

Diskusi politik adalah proses berbicara atau berdialog tentang isu-isu politik dan masalah-masalah terkait pemerintahan, kebijakan publik, dan urusan politik lainnya. Diskusi politik dapat terjadi di berbagai forum, termasuk debat politik, pertemuan umum, media sosial, atau dalam konteks kelompok-kelompok masyarakat. Diskusi politik bertujuan untuk membahas, memahami, dan memecahkan masalah politik serta membentuk opini dan pandangan terhadap isu-isu tersebut. Adapun bentuk partisipasi pemilih dalam hal partisipasi politik dapat dilihat pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Mandalle yang juga menjabat sebagai ketua panitia pemilihan kepala Desa. Beliau memberikan pandangannya terkait seberapa masyarakat sering membicarakan perihal politik atau pemilu.

“untuk seberapa sering masyarakat di Desa Mandalle ini membicarakan politik dalam hal ini pemilu yah. Saya rasa sering karena ini menjadi hal penting yang untuk dibicarakan. Dengan adanya diskusi tentang pemilu bisa membantu meningkatkan partisipasi pemilih karena secara tidak langsung kan mereka paham dan mendengarkan isu-isu politik. Misalnya tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Apalagi ini menjelang pemilihan kepala desa mandalle. Akhir-akhir ini masyarakat mulai sering membicarakan tentang kepala desa seperti apa kira-kira yang bagus untuk periode selanjutnya, supaya desa mandalle lebih baik lagi kedepannya (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023)”.

Sedangkan pernyataan dari hasil wawancara bersama masyarakat Desa Mandalle tentang seberapa masyarakat sering membicarakan perihal politik atau pemilu.

“Sering sepertinya, saya pikir, karena ini menjadi masalah penting yang perlu dibahas. Diskusi tentang pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena mereka dapat secara tidak langsung memahami dan mendengarkan masalah politik. contoh pemimpin yang baik. Selain itu, ini terjadi menjelang pemilihan kepala desa Mandale. Akhir-akhir ini, masyarakat sering berbicara tentang rencana kepala desa untuk periode selanjutnya agar Desa Mandalle lebih baik lagi (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023).

Selain itu, masyarakat lainnya juga sependapat dengan diskusi politik yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Mandalle terutama menjelang pemilihan kepala desa.

“kalau saya sih sering menonton berita-berita politik yah, jadi biasa yang ditonton biasa didiskusikan sama teman kalau ketemu atau sedang berkumpul. Sekarang mau ganti kepala desa harusnya banyak ilmu dan pengetahuan tentang pemilihan ini salah satunya bisa diskusi politik supaya masyarakat paham juga. Saya kira bagus juga kalau ada program tersendiri dari pemerintah desa begitu (Hasil Wawancara dengan NH tanggal 13 April 2023)”.

Masyarakat yang sering melakukan diskusi politik, pastinya selalu ada topik yang menarik untuk dibahas terutama menjelang pemilihan kepala desa Mandalle. Hal ini disampaikan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Mandalle tentang topik yang biasanya dibahas oleh masyarakat menjelang pemilihan umum.

“Menjelang pemilihan kepala desa, biasanya dibahas berbagai topik yang terkait dengan kepemimpinan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Beberapa topik yang sering muncul dalam konteks pemilihan kepala desa itu misalnya program pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Penting juga tentang pembahasan partisipasi pemilih yah. Karena ini partisipasi pemilih sangat berperan kalau ada pemilihan begini (Hasil

Wawancara dengan ADT tanggal 12 April 2023).

Selain itu, masyarakat lainnya juga sependapat tentang pernyataan tentang topik yang biasanya dibahas oleh masyarakat menjelang pemilihan kepala desa Mandalle.

“Sebelum pemilihan kepala desa, banyak diskusi tentang kepemimpinan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa muncul. Program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan adalah beberapa topik yang sering muncul. Selain itu, penting untuk membahas partisipasi pemilih karena partisipasi pemilih sangat penting dalam pemilihan seperti ini (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023).

Selain itu, masyarakat yang lainnya juga sependapat tentang pernyataan tentang topik yang biasanya dibahas oleh masyarakat menjelang pemilihan kepala desa Mandalle.

“Banyak diskusi tentang kepemimpinan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa muncul sebelum pemilihan kepala desa. Tema yang sering muncul termasuk program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, penting untuk membicarakan partisipasi pemilih karena pentingnya partisipasi dalam pemilihan ini. Biasa juga itu penting tentang program kerjanya nanti. Pokoknya membahas ke depan yang apa yang bisa dilakukan oleh calon kepala desa supaya masyarakat di mandalle ini bisa sejahtera begitu (Hasil Wawancara NH tanggal 12 April 2023).

Menentukan seorang pemimpin tentunya ada berbagai kriteria yang diharapkan oleh masyarakat. Memilih pemimpin yang salah adalah hal yang sangat fatal dan dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat di Desa Mandalle. Pemilihan kepala desa Mandalle kali ini tentunya terdapat harapan tersendiri dari masyarakat tentang sosok pemimpin selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh ketua panitia pemilihan tentang kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh Desa Mandalle.

“kepala desa yang baik itu kan biasanya punya beberapa karakteristik kunci yang dihargai oleh masyarakat. Kepala desa yang baik harus memiliki integritas yang tinggi. Masyarakat menghargai pemimpin yang jujur, transparan, dan konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka. Kepala desa yang efektif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan pandangan dan masukan warga desa serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan program desa (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023)”.

Setiap masyarakat memiliki kriteria pemimpin yang idealnya masing-masing. Termasuk masyarakat Desa Mandalle juga punya pendapatnya tentang pemimpin yang baik untuk menjadi kepala desa Mandalle selanjutnya.

“yang pastinya yang baik toh, lebih bagus lagi kalau merakyat, tidak korupsi, nepotisme. Bisa mensejahterakan rakyat pokoknya. Jangan jadi pemimpin yang sombong dan tergiur sama kekuasaan kan tidak baik. Kepala desa harus bekerja ikhlas demi memajukan Desa Mandalle (Hasil Wawancara S tanggal 12 April 2023).

Selain itu, masyarakat yang lainnya juga sependapat tentang pemimpin yang baik untuk menjadi kepala desa Mandalle selanjutnya.

“Itu jelas hal yang baik, tetapi akan lebih baik lagi jika merakyat dan menghindari korupsi dan nepotisme. bisa memberikan kesejahteraan kepada penduduk pokoknya. Pemimpin tidak boleh terlalu sombong atau terlalu tergiur dengan kekuasaan mereka. Kepala desa harus berusaha secara tulus untuk memajukan Desa Mandalle. Sama itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat terutama juga ini harus memperhatikan masyarakat miskin disini (Hasil Wawancara NH tanggal 12 April 2023)”.

Pada dasarnya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa. Buktinya dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat dalam membicarakan tentang politik dan pemilihan kepala desa. Setidaknya masyarakat paham tentang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga paham bahwa

penting berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Mandalle.

Pemahaman politik yang dimiliki oleh masyarakat berdampak pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketika partisipasi politik warga negara meningkat, demokrasi dapat berjalan. Bisa dikatakan bahwa partisipasi politik yang tinggi adalah bagian penting dari sistem politik. Namun, warga negara harus lebih menyadari pentingnya sistem politik yang demokratis, berdaulat, dan berkualitas untuk membangun pemerintahan yang kuat (Adam, et.al, 2023).

2. Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh kandidat politik, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya untuk mempromosikan diri mereka dan memperoleh dukungan dari pemilih. Kegiatan kampanye menjadi bagian integral dari proses politik dalam sistem demokrasi dan bertujuan untuk memengaruhi opini publik, membujuk pemilih, dan memenangkan dukungan dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Salah satu bentuk partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa Mandalle yaitu adanya kegiatan kampanye. Masyarakat memberikan pendapatnya tentang media yang bagus digunakan saat melakukan kampanye. Hal ini diutarakan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Mandalle.

“Kampanye pemilihan kepala desa memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan sifat lokal, demografi penduduk desa, serta cara-cara komunikasi yang efektif di lingkungan masyarakat desa. Bertatap muka dengan penduduk desa melalui pertemuan komunitas, dialog publik, dan kegiatan lokal dapat membangun hubungan yang kuat dan memungkinkan calon untuk langsung berinteraksi dengan pemilih.

Menciptakan pamflet, brosur, dan materi cetak lainnya yang sederhana dan mudah dimengerti dapat membantu calon kepala desa menyampaikan visi dan rencana mereka kepada pemilih. Melakukan kampanye door-to-door untuk berbicara langsung dengan penduduk desa. Pendekatan ini dapat membantu membangun keterlibatan personal dan kepercayaan (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023).

Selain itu, masyarakat yang lain juga memberikan pendapatnya tentang media atau bagaimana cara yang bagus dilakukan oleh calon kepala desa dalam ber kampanye kepada masyarakat.

“Kampanye pemilihan kepala desa memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik lokal, demografi, dan metode komunikasi yang efektif. Kandidat calon kepala desa dapat langsung berinteraksi dengan pemilih melalui pertemuan komunitas, diskusi publik, dan kegiatan lokal untuk membangun hubungan yang kuat. Calon kepala desa dapat menyampaikan visi dan rencana mereka kepada pemilih dengan membuat pamflet, brosur, dan materi cetak lainnya yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk berbicara langsung dengan penduduk desa, lakukan kampanye door-to-door. Metode seperti ini dapat membantu membangun komitmen dan kepercayaan masyarakat desa Mandalle (Hasil Wawancara dengan S pada tanggal 13 April 2023).”

Terdapat pula masyarakat yang juga sependapat dengan pernyataan tersebut. Hal ini diutarakan pada saat melakukan sesi wawancara kepada masyarakat.

“Kalau menurut saya itu lebih bagus pakai itu pamflet atau pendekatan lebih sama masyarakat. Diskusi sama masyarakat tentang visi misinya kalau mau jadi kepala desa begitu (Hasil Wawancara NH tanggal 13-April 2023).

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon pemimpin, biasanya melibatkan masyarakat agar lebih mudah untuk mendapatkan dukungan. Ke ikutsertaan masyarakat desa Mandalle dalam pemilihan kepala desa disampaikan pada wawancara dengan masyarakat. Salah satunya dengan ketua panitia pemilihan kepala desa Mandalle.

“Ya, masyarakat memiliki peran yang penting dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat adalah salah satu unsur kunci dalam demokrasi yang sehat. Masyarakat dapat mencari informasi tentang calon kepala desa, visi mereka, program, dan rencana kerja. Ini dapat melibatkan membaca literatur kampanye, menghadiri pertemuan, atau mengikuti acara debat. Masyarakat juga dapat berperan dalam mendorong partisipasi pemilih. Ini termasuk mendukung pendaftaran pemilih, membantu orang untuk memahami proses pemilihan, dan mendorong tetangga dan teman-teman untuk menggunakan hak suara mereka (Hasil Wawancara ADT tanggal 12-April 2023).

Berperan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa Mandalle merupakan momen bagi masyarakat juga bisa mengekspresikan kepedulian mereka terhadap pemilihan kepala desa Mandalle.

“Ya, masyarakat sangat terlibat dalam kampanye pemilihan kepala desa. Salah satu komponen utama demokrasi yang sehat adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang kandidat kepala desa, tujuan mereka, program, dan rencana kerja. Ini dapat mencakup menghadiri pertemuan, membaca literatur kampanye, atau mengikuti debat. Selain itu, komunitas dapat berkontribusi pada partisipasi pemilih dalam berbagai cara, seperti membantu orang mendaftar sebagai pemilih, memberi tahu orang tentang proses pemilihan, dan mendorong orang lain untuk menggunakan hak suara mereka (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023).

Masyarakat mandalle tentunya sependapat dengan pentingnya ada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa.

“pastinya harus ada ikut serta masyarakat di dalamnya ini. Supaya masyarakat juga paham dan memiliki setidaknya pengetahuan tentang politik dan system pemilihan. Penting bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pemilihan kepala desa karena hal ini dapat memastikan representasi yang lebih baik dan menghasilkan kepemimpinan yang mewakili kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan desa mereka (Hasil

Wawancara NH tanggal 13 April 2023).

Mencalonkan sebagai kepala desa merupakan sebuah kompetisi bagi setiap calon kepala desa. Namun, persaingan ini haruslah sebuah persaingan yang sehat tidak melupakan etika dan nilai-nilai di dalamnya. Setiap calon pastinya memiliki strateginya agar bisa terpilih menjadi kepala desa.

“Calon kepala desa yang efektif dalam kampanye akan menyampaikan visi dan rencana kerja mereka secara jelas kepada masyarakat yang melibatkan penekanan pada isu-isu yang dianggap penting oleh komunitas. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengadakan konsultasi dapat menciptakan rasa kepemilikan dan mendukung kebijakan kepala desa (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023).”

Strategi tersebut umumnya berfokus pada penyampaian visi misi, hal ini juga disampaikan oleh masyarakat yang lain tentang strategi yang dilakukan calon kepala desa untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

“Selama kampanye, calon kepala desa yang sukses akan menyampaikan visi dan rencana kerja mereka kepada masyarakat dengan menekankan masalah yang dianggap penting oleh masyarakat. Kepala desa dapat mendukung kebijakan mereka dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan konsultasi (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023).”

Masyarakat mandalle juga sependapat dengan pentingnya sebuah strategi dalam meyakinkan visi misi calon kepala desa kepada masyarakat.

“harus jelas visinya kalau mau jadi kepala desa agar masyarakat juga paham apa yang akan dilakukan nantinya kalau sudah terpilih jadi kepala desa. Saya kira seperti itu, tapi perlu diingat juga jangan Cuma janji-janji manis saja. Kita ini mau pemimpin yang baik supaya rakyat sejahtera (Hasil Wawancara NH tanggal 13 April 2023)”.

Penting bagi calon kepala desa dan tim kampanyenya untuk memahami dinamika lokal dan merancang strategi yang dapat merangsang

partisipasi masyarakat. Berbagai inisiatif seperti debat publik, pertemuan masyarakat, dan kampanye penyuluhan dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan membantu masyarakat membuat keputusan yang terinformasi saat pemilihan kepala desa.

Kampanye yang dilakukan oleh kepala desa alangkah baiknya memiliki unsur kreatif. Kampanye kreatif melibatkan berbagai elemen seperti iklan di media sosial, radio, televisi, cetak, dan acara kampanye. Tujuan dari kampanye kreatif ini adalah untuk mempengaruhi pendapat publik, memperkuat citra kandidat, dan mendapatkan dukungan pemilih (Nazma & Jamiati, 2024).

3. Pemberian Suara

Pemberian suara merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam proses demokrasi. Ini adalah cara di mana warga negara memberikan suara mereka untuk memilih kandidat atau mendukung inisiatif tertentu. Pemberian suara sering kali terjadi dalam pemilihan umum, tetapi juga dapat terjadi dalam pemilihan lokal, referendum, atau pemilihan organisasi lainnya. Pemberian suara adalah cara utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki dampak langsung pada pembentukan pemerintahan dan kebijakan.

Melalui pemberian suara, individu menyumbang dalam pembentukan masa depan negara mereka. Pemberian suara adalah sesuatu yang sangat krusial dalam suatu pemilihan. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan karena satu suara sangat berarti bagi masa depan

kehidupan masyarakat. Masyarakat harus memiliki motivasi yang mendorong mereka memberikan suara kepada calon kepala desa yang akan mereka pilih. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan masyarakat desa Mandalle yang juga merupakan ketua panitia pemilihan.

“kalau saya pribadi, mau berpartisipasi yah karena saya merasa memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat dalam menentukan pemimpin khususnya ini kepala desa Mandalle. Kalau dipikir golput itu memang boleh yah tapi ini perbuatan yang sia-sia dan mencerminkan sebuah ketidakpedulian pada kesejahteraan masyarakat (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023).

Orang-orang merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi dan memberikan suara mereka sebagai bentuk kewarganegaraan yang aktif. Keterlibatan dalam pemilihan dianggap sebagai kewajiban untuk mendukung proses demokrasi.

“yah saya berpartisipasi di pemilihan itu sangat penting dan merupakan tanggung jawab saya sebagai warga disini. Dengan memberikan suara saya, saya merasa telah menjadi warga yang baik. Dimulai dari hal kecil seperti ini tapi tentunya sangat berdampak bagi masa depan dan kesejahteraan masyarakat. Kan memang hakikatnya pemilihan ini dipilih sama rakyat. Selain itu, saya memang tertarik dengan isu-isu kenegaraan dan politik seperti ini yah karena memang pemilihan begini selalu jadi topik yang bagus untuk dibahas (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023).

Partisipasi dalam pemilihan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan pemilihan pemimpin yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Orang-orang ingin memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

“Saya secara pribadi ingin berpartisipasi karena saya percaya bahwa tugas saya sebagai anggota masyarakat untuk memilih pemimpin, khususnya kepala desa Mandalle. Jika dipikirkan kembali, golput adalah hal yang baik, tetapi itu adalah tindakan yang sia-sia dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (Hasil Wawancara NH tanggal 13 April 2023)”.

Sebagai seorang pemilih di pemilihan kepala desa, memiliki beberapa kriteria dalam memilih calon kepala desa untuk desa Mandalle.

“Kalau saya memilih tentunya lagi lagi pemimpin yang jelas visi misinya. Juga saya memilih calon yang memiliki reputasi baik dan dianggap memiliki integritas tinggi. Kepemimpinan yang jujur dan adil sering dianggap penting dalam membangun kepercayaan masyarakat (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023)”.

Reputasi dan integritas merupakan dua aspek kunci yang sering dianggap sangat penting dalam memilih calon kepala desa atau pemimpin lokal.

“Kalau saya sih mencari calon yang jujur, adil, dan mematuhi nilai-nilai etika. Integritas mencakup keseluruhan karakter pribadi yang mencerminkan ketulusan dan kejujuran dalam tindakan dan perkataan (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023)”.

Reputasi dan integritas calon adalah fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemilih ingin yakin bahwa pemimpin mereka dapat diandalkan, adil, dan memiliki tekad untuk melayani kepentingan masyarakat dengan tulus. Oleh karena itu, kedua aspek ini sering menjadi faktor penentu dalam keputusan pemilih saat memilih calon kepala desa.

“kembali lagi harus konsisten dengan visi misinya dan dapat Memegang janji-janji yang diucapkan selama kampanye dan bertanggung jawab atas janji-janji tersebut juga dapat meningkatkan citra integritas calon (Hasil Wawancara NH tanggal 13 April 2023).”

Harapan untuk memiliki kepala desa yang berintegritas dapat diwujudkan salah satunya dengan memberikan suara kepada calon kepala desa yang ingin dipilih. Namun, hambatan dan tantangan pasti selalu ada dalam setiap kegiatan termasuk dalam proses partisipasi pemilih dalam memberikan suara.

“kalau saya tidak ada kendala. Tapi biasa itu kendala sering terjadi. Jika data pemilih tidak terupdate, pemilih mungkin menghadapi kesulitan saat mencari nama mereka di daftar pemilih atau mendapatkan informasi yang benar tentang tempat pemungutan suara, makanya semua pihak terkait harus bekerja sama agar ini tidak menjadi kendala lagi (Hasil Wawancara ADT tanggal 12 April 2023)”.

Reputasi dan integritas calon kepala desa sangatlah penting dalam pemilihan. Warga desa ingin dipimpin oleh seseorang yang dapat dipercaya, jujur, dan memiliki integritas yang tinggi. Pemilih ingin memilih calon yang berkomitmen untuk memajukan desa mereka dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk desa, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Adanya sebuah hambatan tidak bisa dihindari, makanya perlu persiapan yang matang dalam melaksanakan pemilihan. Hal ini disebabkan pemilihan merupakan ajang pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Bahkan se tingkat pemilihan kepala desa saja segala kesalahan dalam proses pemilihan tentu harus diminimalisir.

“sejauh ini tidak ada hambatan, aman saja. Semoga bisa memilih nanti kepala desa mandalle (Hasil Wawancara S tanggal 13 April 2023)”.

Selain itu, masyarakat mandalle lainnya juga memberikan pendapatnya tentang hambatan yang dialami oleh pemilih.

“Kalau kendala-kendala teknis biasa banyak terjadi juga yah. Tapi ini harus diatasi oleh orang-orang yang bertugas dalam memastikan pemilihan kepala desa lancar (Hasil Wawancara NH tanggal 13 April 2023)”.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan perbaikan infrastruktur pemilihan, pendidikan pemilih, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam proses pemilihan. Hal ini meliputi penyediaan informasi yang jelas, pelibatan

masyarakat, dan langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses pemilihan.

Kedaulatan rakyat dapat dicapai melalui pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Pemilu juga tempat kompetisi, proses pemungutan suara akan digunakan oleh pemilih untuk menentukan kemenangan suatu kandidat. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Pemilu adalah proses yang sangat penting untuk memilih dan ikut menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Hal ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin pemerintah yang dianggap memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan mereka (Ambarwati & Zetra, 2023).

Mengatasi hambatan dalam pemilihan kepala desa adalah kunci untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan lancar dan adil. Bukan hanya tentang fasilitas saja yang dapat menjadi penghambat dalam adanya pemilihan dan partisipasi pemilih. Namun, pendidikan politik juga harus dimiliki oleh masyarakat agar mereka sadar pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Memberikan pendidikan dan informasi kepada pemilih tentang proses pemilihan, hak suara mereka, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan dapat membantu mengatasi hambatan seperti ketidaktahuan atau apatis terhadap politik lokal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Partisipasi pemilih mengacu pada sejauh mana warga suatu negara atau wilayah aktif dalam proses pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Undang-

undang Pemilu No. 7 tahun 2017 memberi semua warga negara yang memenuhi persyaratan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung (Putri & Putri, 2021).

Kualitas pemilu ditentukan oleh keterwakilan yang diberikan oleh sistem pemilu. Kualitas pemilu yang lebih baik terkait dengan tingkat representasi politik warga negara yang lebih tinggi, sedangkan representasi yang lebih rendah menunjukkan kegagalan sistem. Oleh karena itu, perpaduan tiga pilar yaitu undang-undang pemilu, proses pemilu, dan penyelenggaraan pemilu berkontribusi pada pemilu yang berkualitas dan demokratis (Zulkarnain et al., 2023). Partisipasi pemilih adalah indikator penting dalam menjaga kesehatan demokrasi dan menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam keputusan politik. Bentuk partisipasi pemilih masyarakat desa Mandalle dalam rangka pemilihan kepala desa Mandalle terdiri atas tiga bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Diskusi Politik

Kerangka teoritis penelitian ini menjelaskan bahwa kaum muda sering berbicara tentang masalah politik online dan offline (publik dan privat). Ruang publik tidak terbatas pada informasi sosial-spasial atau media untuk publik. Ruang publik memungkinkan orang untuk berbicara secara publik dan memobilisasi massa untuk masalah tertentu (Saud et al., 2020).

Diskusi politik adalah proses berbicara atau berbicara tentang masalah politik dan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, dan urusan politik lainnya. Diskusi politik dapat terjadi di berbagai tempat, seperti debat politik, pertemuan umum, media sosial, atau dalam kelompok masyarakat tertentu. Tujuan diskusi politik adalah untuk mempelajari, memahami, dan menyelesaikan masalah politik serta mengembangkan pendapat dan perspektif tentang masalah tersebut.

Jadi, diskusi politik adalah persepsi manusia tentang bagaimana masyarakat berperilaku terhadap kehidupan politik. Karena sistem politik adalah interaksi antara masyarakat yang mencakup masalah kekuasaan, pola sikap masyarakat terhadap berbagai masalah dan peristiwa politik juga tercermin dalam pembentukan struktur dan proses aktivitas politik dalam pemerintahan dan masyarakat (Syuhada, 2023).

Pada dasarnya, masyarakat memiliki peran penting dalam memilih kepala desa. Masyarakat sangat bersemangat untuk berbicara tentang politik dan pemilihan kepala desa. Untuk saat ini, masyarakat memiliki pemahaman tentang jenis pemimpin yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat juga menyadari bahwa berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa Desa Mandalle sangat penting. Masyarakat desa Mandalle mewujudkan diskusi politik dengan selalu mendiskusikan sosok pemimpin atau kepala desa yang baik untuk memimpin desa Mandalle. Selain itu, dengan adanya diskusi politik yang dilakukan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena semakin sering berdiskusi maka, masyarakat akan paham tentang

esensi dari pemilihan dan tugas seorang pemimpin serta cara memilih pemimpin yang baik.

2. Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempromosikan atau mendukung tujuan tertentu, seperti kemenangan dalam pemilihan umum atau mendapatkan dukungan untuk suatu inisiatif atau proyek. Kegiatan kampanye dapat melibatkan berbagai strategi dan metode untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tahap terpenting dari proses pilkades bagi kandidat calon kepala desa, masa kampanye adalah waktu di mana setiap kandidat berusaha untuk meyakinkan pemilih untuk mendukung mereka dan memberikan suara mereka. Untuk mendukung upaya masing-masing kandidat untuk mendapatkan suara dari masyarakat, setiap kandidat harus menerapkan strategi atau pendekatan yang jitu (Pratiwi et al., 2020).

Produk (*product*), promosi (*promotion*), harga (*price*), dan penempatan (*place*) adalah empat P yang dapat digunakan dalam proses kampanye politik. Selanjutnya, keempat bauran pemasaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye politik. Kampanye, menurut Kotler dan Roberto, adalah sebuah upaya yang diatur oleh satu kelompok (agen perubahan) yang bertujuan untuk memersuasi orang-orang yang dituju agar mereka dapat menerima, mengubah, atau menghapus ide, sikap, dan perilaku tertentu. Namun, kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang dapat digambarkan dengan cara tertentu.

Maksud dari produk yang ditawarkan oleh institusi politik adalah sesuatu yang kompleks, di mana pemilih akan senang dengannya setelah partai atau kandidat terpilih. Tidak hanya ciri-ciri produk politik yang penting, tetapi bagaimana pemilih memahaminya juga memainkan peran penting dalam memahami dan menginterpretasikan produk politik. Konsep dan ideologi termasuk dalam produk ini yang membentuk produk politik saat ini dan sebelumnya.

Selama kampanye pemilu, sebuah institusi politik biasanya mempromosikan ide, platform partai, dan ideologi. Tidak jarang, institusi politik bekerja sama dengan agen iklan untuk membuat slogan, jargon, dan citra yang akan ditampilkan. Perlu digaris bawahi bahwa promosi institusi politik tidak terbatas pada periode kampanye. Aktivitas promosi tidak boleh terbatas pada periode kampanye saja; harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus.

Selanjutnya, harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye, termasuk ekonomi, psikologi, dan citra nasional. Institusi politik berusaha untuk meminimalkan harga produk politik mereka dan meningkatkan harga produk politik lawan mereka. Ada juga hubungan erat antara kehadiran dan distribusi institusi politik serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian kepada masyarakat desa mandalle partisipasi politik dalam bentuk kegiatan kampanye yang dapat dilakukan adalah kampanye pemilihan kepala desa memerlukan pendekatan yang

mempertimbangkan sifat lokal, demografi penduduk desa, serta cara-cara komunikasi yang efektif di lingkungan masyarakat desa. Bertatap muka dengan penduduk desa melalui pertemuan komunitas, dialog publik, dan kegiatan lokal dapat membangun hubungan yang kuat dan memungkinkan calon untuk langsung berinteraksi dengan pemilih. Menciptakan pamflet, brosur, dan materi cetak lainnya di media sosial yang sederhana dan mudah dimengerti dapat membantu calon kepala desa menyampaikan visi dan rencana mereka kepada pemilih.

Melakukan kampanye *door-to-door* untuk berbicara langsung dengan penduduk desa. Pendekatan ini dapat membantu membangun keterlibatan personal dan kepercayaan masyarakat. Penggunaan media sosial dalam kegiatan kampanye juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Sunarso, 2020) yang menyebutkan bahwa karena media sosial melekat dalam kehidupan sehari-hari pemilih pemula, dianggap bahwa partisipasi politik pemilih akan meningkat ketika kampanye politik dijalankan melalui media sosial.

Masyarakat desa Mandalle memiliki peran yang penting dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat adalah salah satu unsur kunci dalam demokrasi yang sehat. Kampanye pemilihan kepala desa melibatkan partisipasi masyarakat yang signifikan. Partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat. Masyarakat dapat mengetahui tentang calon kepala desa, motivasi mereka, program, dan

rencana kerja. Ini dapat termasuk menghadiri pertemuan, membaca literatur kampanye, atau berpartisipasi dalam debat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh kegiatan kampanye memiliki tujuan nyata untuk mengubah masyarakat. Aksi kampanye mempengaruhi orang melalui komunikasi dua arah dan pengaruh langsung melalui media yang membentuk opini publik dan mendukung kegiatan kampanye dan pengaruh tidak langsung (Febrissya & Irawaty, 2023).

Kegiatan kampanye yang baik harus memperhatikan beberapa hal penting agar efektif dan etis. Tujuan yang jelas: Kampanye harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur agar dapat dievaluasi kemajuannya. Penyampaian pesan yang jelas, pesan kampanye harus mudah dipahami dan relevan dengan audiens target. Hindari penggunaan bahasa yang rumit atau ambigu. Target audiens yang tepat, identifikasi siapa yang ingin anda sampaikan pesan kampanye dan sesuaikan strategi kampanye dengan demografi, kepentingan, dan nilai-nilai mereka.

Gunakan pendekatan kreatif untuk menarik perhatian audiens. Misalnya, melalui seni visual, cerita, atau kampanye daring yang interaktif. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua platform dan materi kampanye. Berikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam kampanye, baik melalui diskusi, aksi langsung, atau melalui media sosial. Penggunaan media yang beragam, Gunakan berbagai platform media untuk menjangkau audiens yang lebih luas, seperti media sosial, surat kabar, radio, dan televisi.

Transparansi dan kejujuran, sampaikan informasi yang akurat dan jujur tentang isu yang di kampanyekan. Evaluasi dan penyesuaian, terus pantau kemajuan kampanye dan siap untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Kepatuhan hukum, Pastikan kegiatan kampanye Anda mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk regulasi tentang pembiayaan kampanye dan etika dalam kampanye politik.

3. Pemberian Suara

Dalam konteks politik, pemberian suara merujuk pada hak setiap warga negara untuk memilih calon yang diinginkan dalam pemilihan umum. Ini adalah bentuk partisipasi demokratis di mana suara setiap individu memiliki pengaruh dalam menentukan perwakilan atau kebijakan yang akan diadopsi. Pemberian suara juga terwujud dalam sebuah pemilihan termasuk pemilihan kepala desa di Mandalle.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mandalle, partisipasi pemilih dalam hal pemberian suara kepada calon kepala desa didukung dengan keyakinan masyarakat tentang tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi dan memberikan suara mereka sebagai bentuk kewarganegaraan yang aktif. Keterlibatan dalam pemilihan dianggap sebagai kewajiban untuk mendukung proses demokrasi.

Sebelum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, pemilihan kepala desa hanya dilakukan oleh perangkat desa dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat. Pemilihan kepala desa pada saat itu belum melibatkan langsung partisipasi masyarakat desa, termasuk

pemuda, dalam menentukan pemimpin mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa tidak memiliki hak suara dalam menentukan kepala desa mereka. Namun, setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa menjadi diakui dan dijamin. Dalam UU tersebut, diatur bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa melalui mekanisme pemungutan suara.

Pemerintah desa harus menganggap Pilkades sebagai bentuk, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, yang mengubah aturan Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan efisien (Hutajulu et al., 2023).

Masyarakat memberikan suara berdasarkan tanggungjawab sebagai warga Negara yang baik, namun tetap memiliki sebuah kriteria dalam memilih calon kepala desa Mandalle. Masyarakat memilih calon yang memiliki visi misi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat Mandalle kedepannya. Pemilih cenderung memilih calon yang memiliki reputasi baik

dan dianggap memiliki integritas tinggi. Kepemimpinan yang jujur dan adil sering dianggap penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemilih juga memilih berdasarkan visi dan program kerja calon untuk masa jabatan kepala desa. Calon yang memiliki rencana konkret dan terperinci untuk memajukan desa dapat menarik perhatian pemilih.

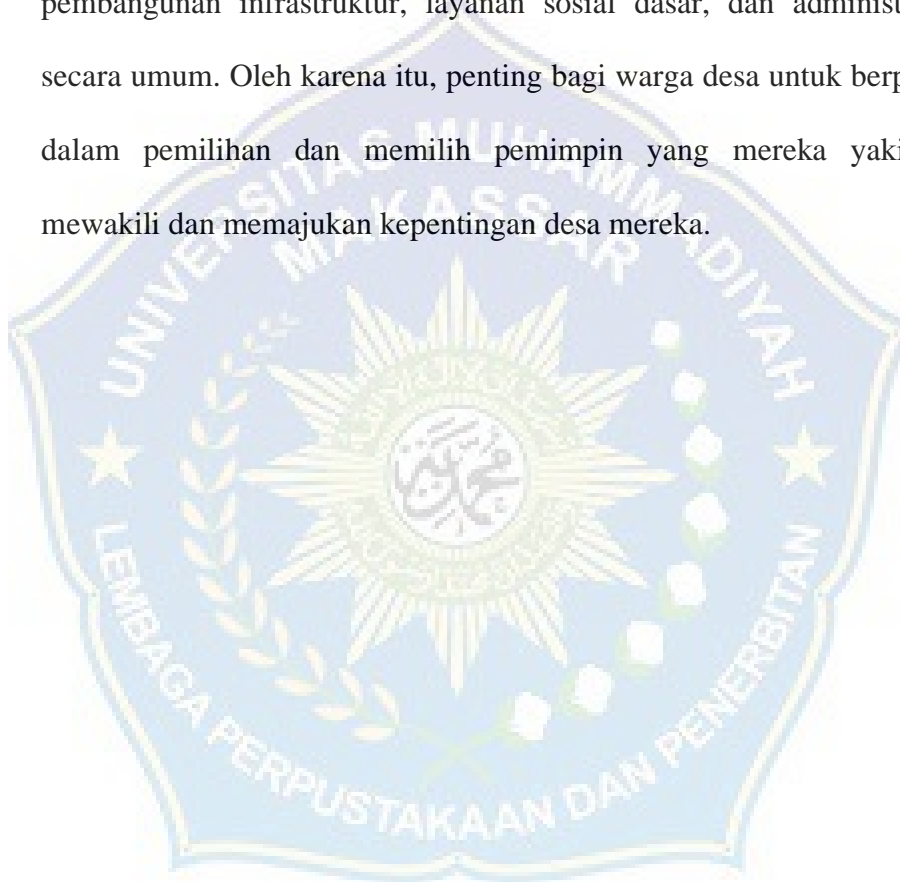
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mandalle yang memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa hal itu disebabkan karena tanggung jawab dan hak sebagai warga Negara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febrissya & Irawaty, 2023) yang menyebutkan bahwa Sebagian besar warga menggunakan hak pilihnya karena mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka juga menggunakan hak pilihnya untuk menyampaikan aspirasinya karena sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak untuk mengikuti pemilihan kepala desa secara langsung yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis di mana warga desa memilih pemimpin mereka sendiri. Proses ini biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan setempat. Tahapan dalam pemilihan kepala desa dapat bervariasi tergantung pada negara dan hukum setempat, tetapi umumnya melibatkan pendaftaran kandidat, kampanye, pemungutan suara, dan pengumuman hasil.

Biasanya, calon kepala desa akan melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari penduduk desa dengan menjelaskan visi,

program, dan komitmen mereka kepada masyarakat. Setelah itu, pemilih akan memberikan suara mereka pada hari pemilihan dan hasilnya diumumkan setelah pemungutan suara selesai dihitung.

Pemilihan kepala desa sangat penting karena kepala desa bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan di desa, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial dasar, dan administrasi desa secara umum. Oleh karena itu, penting bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memilih pemimpin yang mereka yakini dapat mewakili dan memajukan kepentingan desa mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan kepala desa adalah sebuah momentum yang mencerminkan hidupnya konsep Negara demokrasi. Pemilihan kepala desa di Desa Mandalle didukung oleh tiga bentuk yang dimiliki oleh setiap pemilih. Hal ini merupakan bentuk partisipasi pemilih yang diwujudkan dalam diskusi politik, kegiatan kampanye dan pemberian suara. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Diskusi Politik

Masyarakat desa Mandalle mewujudkan diskusi politik dengan selalu mendiskusikan sosok pemimpin atau kepala desa yang baik untuk memimpin desa Mandalle. Selain itu, dengan adanya diskusi politik yang dilakukan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena semakin sering berdiskusi maka, masyarakat akan paham tentang esensi dari pemilihan dan tugas seorang pemimpin serta cara memilih pemimpin yang baik.

2. Kegiatan Kampanye

Kampanye pemilihan kepala desa adalah salah satu contoh dari partisipasi politik dalam bentuk kegiatan kampanye yang dapat dilakukan. Kampanye ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik lokal, demografi, dan cara komunikasi yang efektif dengan penduduk desa. Masyarakat Mandalle sangat terlibat dalam kampanye pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat adalah komponen penting

dari demokrasi yang sehat. Hal ini terbukti dalam kampanye pemilihan kepala desa, yang melibatkan partisipasi masyarakat yang besar.

3. Pemberian Suara

Masyarakat desa Mandalle memberikan suaranya kepada calon kepala desa karena adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, masyarakat juga memilih calon kepala desa Mandalle berdasarkan kriteria tertentu. Mereka memilih kandidat yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan masyarakat Mandalle. Kandidat yang terkenal dan dianggap bermoral cenderung dipilih pemilih. Membangun kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kepemimpinan yang jujur dan adil. Selain itu, pemilih memilih kandidat berdasarkan visi dan rencana kerja mereka untuk masa jabatan kepala desa. Mereka yang memiliki rencana yang jelas dan rinci untuk membantu desa dapat menarik pemilih. Calon yang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan terlibat dalam kegiatan komunitas seringkali lebih dipilih. Pemilih akan menilai kemampuan calon untuk memimpin dengan baik, memecahkan masalah, dan memperjuangkan kepentingan warga desa secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mandalle tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti demi memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Adapun saran dari peneliti dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Masyarakat harus mempelajari dengan cermat latar belakang, pengalaman, dan visi-misi dari setiap calon. Masyarakat harus memahami pandangan mereka terhadap isu-isu penting.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi partisipasi pemilih dan harus meminimalisir adanya kesalahan dalam penyelenggaraan pemilihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. M., & Sunarso, S. (2022). Persepsi tentang kampanye politik melalui media sosial dan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. *AGORA*, 11(3), 272-283.
- Alam, G. M., Parvin, M., Ayub, A. F. B. M., Kader, R., & Rahman, M. M. (2020). Does an MBA degree advance business management skill or in fact create horizontal and vertical mismatches. *Business Process Management Journal*, 27(4), 1238–1255. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2020-0465>
- Almond, G. A & Verba, S. (1984). *Budaya politik. Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ambarwati, R., & Zetra, A. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(3), 571-580.
- Azzuhri, H. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 66–76. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12692>
- Chaerul. (2019). partisipasi politik masyarakat adat kajang dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi selatan tahun 2018. *Skripsi. Unismuh*
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Djafar, Y. (2008). Peranan pers dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. *Jurnal Ilmiah Dinamika* 1 (1): 1-5.
- Damayanti, A. S., & Fauzi, A. M. (2022). Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 228–236. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17215>
- Febrissya, T. (2023). Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional Wajib Pilih Desa Lasuai Pada Pemilihan Bupati Periode 2020-2025. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan*, 1(2), 69-75.
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan

- Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.
- Hadi, Purbathin, & Agus. (2013). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan* Jurnal.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), 90-98.
- Henryk & Stepanus. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Partisipasi warga negara merupakan nafas dalam negara demokrasi Partisipasi tidak hanya sebatas bagaimana masyarakat memberikan hak suara mereka saat pemiliha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85–100.
- Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 46–52. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i1.180>
- Haluana, F. (2019). *Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan)*.
- Helen Meliana R Hutajulu, Angelina Putri, & Julia Ivanna. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.616>
- Leguh, Labolo, Muhadum, & Ilham. (2015). *Partai Politik Nan Sistem Pemilihan*

Umum Di Innonesia Taari, Konsep Dan Isu Strategis. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Mariana, L., Yuliani, N. F., Rachman, S., Indarwati, I., & Siswanto, A. (2021). Pemberian Motivasi Etrepreneurship bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Desa Mandalle Kabupaten Gowa. *Jurnal IPMAS*, 1(1), 30–36.

McClosky Herbert dalam Bpak Kh. Budiardjo Miriam. (2008). *Dasar Dasar pandangan Ilmu Politik.* Jakarta: gamedia di pustaka utama.

Mursyid, S., & Larissa, D. (2021). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif SiyasaH Syar'iah. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH*, 2(2), 442-453.

Nazma, A. A., & Jamiati, K. N. (2024). Kampanye Kreatif Calon Presiden Anis Baswedan pada Media Sosial TikTok. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3), 86-93.

Pratiwi, C. S., Bafadhal, F., & Giovani, A. S. (2020). Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana Pada Pilkadaes Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1502>

Putri, F. D., & Putri, I. A. (2021). Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(1), 13–22. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.13-22.2021>

Ramlan. S. (2010). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo.

Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>

Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Peran Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik Pada Generasi Muda. *Journal Society*, 8(1), 87–97. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>

Syuhada, O. (2023). TERBENTUKNYA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DALAM TATANAN KEHIDUPAN BERNEGARA YANG DEMOKRATIS. *Journal Presumption of Law*, 5(2), 199–214. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i2.6598>

- Usman, Setiadi, M, Elly & Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Umami, R., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 143–152. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16123>
- Windy, P. K. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–12.
- Yani, A. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456. <https://doi.org/10.31078/jk1929>
- Yusran, I. I., & Sapar, S. (2022). Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Di Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara). *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 187-203.
- Zulkarnain, A., Ririn Septia, Robing, R., & Irvan Ansyari. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 193–210. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2474>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Lampiran Wawancara

Lampiran 2: SK Pembimbing





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2774/FSP/A.1-VIII/XI/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Muh. Fachri Ismiraj
Stambuk : 10564 11052 18
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa
Judul Skripsi : *"Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa"*
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu, Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 November 2023
Ketua Jurusan IP

Ahmad Harahan, S.I.P., M.H.I
NBM : 1207 183

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 30289/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2857/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 23 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH FACHRI ISMIRAJ
Nomor Pokok	: 105641105218
Program Studi	: Ilmu pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D4)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun KARYA TULIS, dengan judul :

" PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MANDALLE KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 November 2023 s/d 30 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

Lampiran 4: Pedoman Wawancara Masyarakat dan Ketua Panitia Pemilihan

1. Diskusi Politik

- a. Apakah anda sering membicarakan perihal politik atau pemilu?
- b. Apa saja topik menarik yang dibahas terutama menjelang pemilihan kepala desa?
- c. Menurut anda, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Desa Mandalle?

2. Kegiatan Kampanye

- a. Apa jenis media atau platform yang paling efektif digunakan dalam kampanye?
- b. Apakah anda memiliki keikutsertaan dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala desa?
- c. Apa strategi utama yang digunakan dalam kegiatan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat?

3. Pemberian Suara

- a. Apa yang mendorong Anda untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan ini dan memberikan suara Anda?
- b. Bagaimana Anda memilih kandidat atau partai yang akan Anda dukung? Apakah ada kriteria khusus yang menjadi pertimbangan utama Anda?
- c. Apakah ada hambatan atau tantangan tertentu yang Anda alami dalam proses memberikan suara, seperti jarak ke tempat pemilihan, atau kendala lainnya?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

Ketua Panitia Pilkades: Ahmad Dg Tawang



Masyarakat :Suardi, SP



Masyarakat : Nurhikmawati





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh Fachri Ismiraj

Nim : 105641105218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

by Tahap Tutup



Submission date: 08-May-2024 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2374065878

File name: BAB_1_FACHRI.docx (22.29K)

Word count: 1635

Character count: 10937

BAB I MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unja.ac.id Internet Source		3%
2	eprints.ums.ac.id Internet Source		2%
3	docobook.com Internet Source		2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 05:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379072762

File name: BAB_II_FACHRI_1.docx (39.9K)

Word count: 2788

Character count: 18963

BAB II MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	journal.umpo.ac.id Internet Source	10%
2	docplayer.info Internet Source	3%
3	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

by Tahap Tutup



Submission date: 14-May-2024 05:24PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379072906

File name: BAB_III_FACHRI_1.docx (23.7K)

Word count: 945

Character count: 6311

BAB III MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

7%

2

ecampus.iainbatusangkar.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB IV MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

by Tahap Tutup



Submission date: 08-May-2024 03:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 2374070017

File name: BAB_IV_FACHRI.docx (35.74K)

Word count: 5373

Character count: 35711

BAB IV MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		3%
2	ejournal.mandalanursa.org Internet Source		3%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

> 2%

Exclude bibliography

On



BAB V MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

by Tahap Tutup



Submission date: 08-May-2024 03:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2374070224

File name: BAB_V_FACHRI.docx (18.52K)

Word count: 570

Character count: 3819

BAB V MUH FACHRI ISMIRAJ - 105641105218

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	golkarkukar.blogspot.com Internet Source		2%
2	dokumen.tips Internet Source		2%
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

0%

Exclude matches

Exclude bibliography

0%



RIWAYAT HIDUP



Muh Fachri Ismiraj dilahirkan di Limbung tanggal **3 november 1984**.

Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menempuh jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012 di SD Inpres Tamattia. Kemudian pada tahun yang sama masuk ke MTs Muhammadiyah Mandalle dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 masuk di SMAN 4 Takalar dan tamat 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program strata satu (S1). Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah dengan judul "Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Barat Kabupaten Gowa".